

**PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Disusun oleh :

LUTHFIANA KUSUMAJATI
NIM. A220120048

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI
PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

LUTHFIANA KUSUMAJATI
NIM. A220120048

Telah disetujui dan Disyahkan oleh Pembimbing
Untuk Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



Dra. Hj. Sri Arfiah, SH, MPd
NIK. 235

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

LUTHFIANA KUSUMAJATI

A220120048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Selasa., tanggal 1 November 2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Dra. Hj. Sri Arfiah, S.H., M.Pd.
2. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
3. Dra. Sundari, SH.M.Hum

()
()
()

Surakarta, 1 November 2016

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,




Prof. Dr. Haryo Joko Prayitno, M.Hum
NIP. 19650428 1993031 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Oktober 2016

Penulis



LUTHFIANA KUSUMAJATI

A220120048

**PERANAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
DESA WINDUREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

ABSTRAK

Bencana di tanah air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamankan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini. Tujuan Penelitian untuk mengetahui peranan BNPB dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Metode Penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yang dilakukan dengan survai pada BPBD Kabupaten Pekalongan. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi untuk mendapatkan data peran BPBD dalam penanggulangan bencana. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kondisi daerah Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian diketahui keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat. Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana. Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik.

Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah dukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi dan organisasi yang mendukung penanggulangan bencana. Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah sumber daya manusia yang mendukung masih banyak yang belum kompeten dan sarana dan prasarana yang belum juga memadai.

Kata Kunci :peran BPBD, bencana dan penganggulangnya

ABSTRACT

Disaster in this country happens not just in certain areas even in almost every area experience a disaster for the then Law number 24 in 2007 Section 8 mandates the establishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) at the provincial, regency / municipality. Accordingly, the government must issue local regulations on the handling of the case by the government's Disaster Pekalongan regency also has BPBD that has stood more than two years. Objective Research to

determine the role of BNPB in disaster management in the village Windurejo Kesesi District of Pekalongan.

Method of this study is a qualitative description of the survey conducted by the BPBD Pekalongan. Methods of data collection were interviews and observations to obtain data BPBD role in disaster management. Documentation used to collect data on the condition Village area Windurejo Kesesi District of Pekalongan. Data validation was done using data triangulation technique. Data were analyzed using an interactive model.

The survey results revealed the presence of BPBD as the main actors in disaster management in the village Windurejo already known by the public. During this time BPBD role in disaster relief starting from before the disaster, emergency response (during a disaster) and post-disaster. BPBD role in disaster management is related to its role as a coordinator. All coordination in disaster response conducted by BPBD so that all goes well. Factors that inhibit BPBD role in disaster management is the support of local governments and support agencies and organizations supporting disaster relief. Factors that inhibit BPBD role in disaster management is human resource that supports many are not competent and infrastructure is not yet adequate.

Keywords: role of BPBD, disaster and mitigation

1. PENDAHULUAN

Posisi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Oleh karena itu membuat bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana ini. Selama ini kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikan kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Guna mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana. Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah nondepartemen sebagai menteri.

Bencana di tanah air ini terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir di setiap daerah mengalami bencana untuk itu maka Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamankan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten/kotamadya. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah memiliki BPBD yang telah berdiri kurang lebih dua tahun ini.

Kondisi Kabupaten Pekalongan terutama daerah Windurojo yang merupakan daerah dengan tanah bergerak yang memungkinkan setiap saat akan terjadi bencana. Bahkan telah terjadi beberapa waktu lalu di kecamatan Kesesi daerah Windurojo salah satu bangunan sekolah yaitu SD Windurojo 3 kondisi bangunannya retak akibat tanahnya retak sehingga memungkinkan temboknya bisa roboh sewaktu-waktu. Padahal sekolah tersebut masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu atas imbauan BPBD untuk dilakukan pembongkaran bangunan gedung sekolah yang telah retak tersebut untuk menghindari tembok roboh yang terjadi sewaktu-waktu dan itu bisa membawa korban jika tembok nantinya roboh.

Kondisi itu merupakan salah satu yang terjadi dan kemungkinan di daerah lain di sekitar Windurojo juga akan bisa terjadi bencana karena kondisi tanah yang labil sehingga ketika cuaca ekstrem akan mengikis tanah dan memudahkan bangunan di atasnya akan retak-retak juga. Sudah sepatutnya bagi masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya BPBD mengambil langkah untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana.

Pengamatan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pekalongan memang sudah terlihat tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi namun masih terlihat bahwa semua koordinasi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi dengan baik terutama yang terkait dengan instansi lain. BPBD sebenarnya sudah berusaha menghimbau instansi-instansi yang terlibat untuk berkoordinasi terlebih dahulu namun karena semua wewenangnya ada di BPBD instansi lain hanya menunggu.

Padahal dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi administrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut :

- 1.1 Bagaimana peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ?
- 1.2 Apakah faktor yang pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BPBD Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Subyek penelitian ini adalah Kepala desa dan tokoh masyarakat desa Windurejo Kecamatan

Kesesi, pimpinan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pekalongan dan jajarannya. Obyek dalam penelitian ini adalah peran BPBD dalam penanggulangan bencana di desa Windurejo kecamatan kesesi Kabupaten Pekalongan. Sumber Data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data ini diambil dari hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai BPBD dan tokoh masyarakat di desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan mengenai peran BPBD dalam menangani bencana.

2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan secara tidak langsung, berisi data kepustakaan, dokumen dan juga literatur yang mendukung penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data yang obyektif dan akurat maka diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain :

2.2.1 Wawancara;

Wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang telah diperoleh, yaitu mengenai peranan BPBD dalam menanggulangi bencana. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari kepala BPBD, pegawai BPBD, tokoh masyarakat dan unsur muspika di desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Wawancara dengan kepala BPBD dilakukan untuk menghimpun data mengenai peranan BPBD. Wawancara dengan pegawai BPBD dilakukan untuk menghimpun data mengenai aktivitas BPBD dalam penanggulangan bencana. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan muslika setempat dilakukan untuk menghimpun data mengenai kiprah BPBD dalam menanggulangi bencana di desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Peneliti lebih banyak

mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara.

2.2.2 Observasi;

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi yang ada di daerah penelitian dan juga observasi di BPBD desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Instrumen yang digunakan lembar observasi.

2.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang peranan BPBD dalam menanggulangi bencana di desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Instrumen yang digunakan berupa telaah dokumen berdasarkan indikator peran BPBD.

Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu data yang telah dikumpulkan dalam penelitian harus diuji keabsahannya untuk memperoleh temuan yang akurat. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi teknik, berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi sumber, berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang terdiri dari beberapa model salah satunya yaitu analisis interaktif dari H.B Sutopo (2004 :16) yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian dan kemudian kesimpulan. Selain itu dilakukan pula proses siklus tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.3.1 Tahap pengumpulan data. Proses pengambilan data tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan hasil

pengamatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto, pengalaman pribadi, simbol-simbol yang melekat dan dimiliki, serta pendengaran.

2.2.3.2 Tahap reduksi data. Data yang didapat mengenai implementasi karakter kejujuran kepada pedagang yang sudah dipilah-pilah. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan difokuskan pada wilayah penelitian yaitu mengenai peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2.2.3.3 Tahap penyajian data. Menyajikan mengenai peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berikut kendala dan solusinya.

2.2.3.4 Kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari hasil analisis peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berikut kendala dan solusinya.

3. HASIL PENELITIAN

Keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat. BPBD yang menangani bencana yang timbul di Desa Windurejo adalah BPBD Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2016 ini lebih mengacu pada Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 360/412 tanggal 30 November 2016, tentang penetapan status keadaan siaga darurat penanganan Bencana angin, banjir dan longsor yang berlangsung 91 hari terhitung sejak 1 Desember 2015. Keberadaan BPBD di tengah masyarakat Desa Windurejo diharapkan dapat memberikan solusi buat masyarakat, paling tidak memberikan peringatan dini ketika akan terjadi bencana khususnya bencana tanah longsor yang bisa sewaktu-waktu terjadi ketika musim hujan datang. Dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa BPBD itu selalu ada sebelum maupun saat bahkan hingga selesai bencana. Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.

Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik. Peran BPBD dalam penanggulangan bencana di desa Windurejo membutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Keperluan koordinasi tersebut dapat muncul diberbagai tahapan tergantung pada cakupan bencana itu sendiri. BPBD dalam penanggulangan bencana selama ini telah sesuai dengan intruksi dan juga arahan selain itu juga mengacu pada prosedur yang ada. Selama ini BPBD yang berperan dalam kendali koordinasi penanggulangan bencana sehingga akan membuat berbagai kegiatan penanggulangan bencana berjalan dengan baik karena sistem koordinasi yang terpusat.

Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah faktor dukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi. BPBD sangat terdukung sekali dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana ini karena pemerintah daerah bisa merealisasikan anggaran yang dibutuhkan BPBD untuk mendukung penanggulangan bencana agar penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik. Dan faktor yang lainnya adalah organisasi yang mendukung penanggulangan bencana. Selain pemerintah daerah yang banyak mendukung BPBD dalam penanggulangan bencana adalah instansi dan organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendukung peran BPBD dalam penanggulangan bencana berjalan dengan baik. Dukungan dari instansi dan organisasi ini akan menjadi sumber daya yang kompeten di bidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari peran BPBD.

Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah faktor pertama sumber daya manusia yang mendukung masih banyak yang belum kompeten. BPBD memang telah memiliki personil dengan sumber daya manusia yang kompeten namun BPBD dalam perannya menanggulangi bencana tidak dapat berjalan baik tanpa adanya sumber daya manusia lain yang berasal dari instansi/organisasi. Faktor kedua sarana dan prasarana yang belum juga memadai. Semua sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPBD Pekalongan sejauh ini sudah sangat lengkap dan kondisinya juga

sangat bagus namun jumlah dari sarana dan prasarana tersebut kurang memadai jumlahnya apalagi saat terjadi bencana seperti tanah longsor yang hanya bisa dilakukan secara manual tanpa alat berat karena kondisi lokasi yang sulit dijangkau oleh alat berat.

4. SIMPULAN

Peranan BPBD dalam penanggulangan bencana alam di desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan meliputi : Keberadaan BPBD sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat. Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana; Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik.

Faktor yang pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana adalah : Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah dukungan pemerintah daerah dan dukungan instansi dan organisasi yang mendukung penanggulangan bencana; Faktor yang menghambat peran BPBD dalam penanggulangan bencana adalah sumber daya manusia yang mendukung masih banyak yang belum kompeten dan sarana dan prasarana yang belum juga memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bevaola Kusumasari, 2014, *Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Sutopo,H.B, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Iyong DS, 2007, *Prosedur Tanggap Darurat Bencana*, Edisi I, Jakarta: PMI.
- Maarif Syamsul, 2010, *Rencana Nasional penanggulangan Bencana Indonesia*, Jakarta.

- Marino Yenni CM, 2012, *Peranan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan*. Tidak dipublikasikan, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Nurkumalasari, 2014, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Maros*, tidak dipublikasikan, Universitas Hasanudin Makasar.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Jakarta: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2001, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-undang RI No. 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana,
- Winarno Surachmat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : BPF.